

## DAFTAR PUSTAKA

- Afryan, A. (2018). *Ketidakefektifan Rezim Kimberley Process (KP) dalam Menangani Permasalahan Perdagangan Intan Kasar Internasional di Zimbabwe pada Tahun 2008-2011*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ambari, M. (2020, Maret 15). *Masih terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktik IUU Fishing*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing>
- Anggoro, F. B. (2022, Juni 16). *Dinas Kelautan Maluku Latih Wanita Seram Timur Diversifikasi Perikanan. Garap Industri Hilirnya*. Retrieved from Antara Maluku: <https://ambon.antaranews.com/berita/126077/dinas-kelautan-maluku-latih-wanita-seram-timur-diversifikasi-perikanan-garap-industri-hilirnya>
- Barnes, D. A. (2004). *Economic Aspects and Drivers of IUU Fishing: Building a Framework*. London.
- Basuki, A. Q. (2014). *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Poros Maritim Indonesia*. *Supremasi Hukum*.
- CNN Indonesia. (2016, Juni 27). *Komando Armada RI kapal nelayan China selalu dibentengi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapal-nelayan-china-selalu-dibentengi>
- Disemadi, A. J. (2020). *Penegakan Hukum Ilegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. *Mulawarman Law Review*.
- European Commission . (2022, Februari 11). *Ocean and Fisheries: Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs)*. Retrieved from European Commission : <https://ec.europa.eu/oceans-and>

fisheries/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-  
management-organisations-rfmos\_en

Hadju, Z. A. (2021). Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum atas Kapal Berbendera Negara Asing. *SASI Vol. 27 No. 1*, 12-23.

Halina, N. P. (2007). *One Question, Two Answer*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Gadjah Mada.

Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2016). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*. Pusat Analisis & Evaluasi Hukum Nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2012). *Keputusan Menteri No. KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan . (2022, Februari 11). *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan : <https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5250-regional-fisheries-management-organizations-rfmos>

Krasner, S. D. (1982). *Structural Causes and Regime consequences Regim as Intervening Variable* . New York : Cornell University Press.

Miles, E. L. (2002). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. London: The MIT Press.

- Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasa. *Politica Vol. 3 No. 1*, 59-85.
- Muslimah, F. A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang dilakukan terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai dengan Hukum Internasional. *Belli Ac Pacis Vol. 5 No. 2*, 87-92.
- Nasution, H. M. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 3*, 379-391.
- Nurhakim, R. (2021). *Menakar Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)*. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan.
- Pusat Riset Kelautan - BRSDM KP. (2018). *Analisis Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna*. Pusat Riset Kelautan - BRSDM KP.
- Putri, N. I. (2020). Kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing dalam Menangani Illegal Unreported and Unregulated (Iuu) Fishing di Perairan Indonesia Periode 2014 – 2016. *Journal of International Relations*, 129.
- Rendi Prayuda, S. H. (2019). *Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis)*. *Journal of Diplomacy and International Studies*.
- Ridwan Mulyana, J. H. (2012). Keberlanjutan Perikanan Skala Besar di Laut Arafura. *Buletin PSP Vol. 20 No. 1*, 35-43.
- Riska, E. (2017). Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 33-47.

- Saputra, F. A. (2016). Dampak Program Pemberantasan IUU Fishing Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-China. *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 1271-1284.
- Sari, A. R. (2021). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN. *Padjajaran Journal of Internasional Relations (PADJIR)*, 242-264.
- Tiara Aji Damastuti, R. C. (2018). Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia dengan China. *Jurnal Reformasi Hukum*.
- Tombakan, R. C. (2021). Prosedur Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Lex Crimen Vol. X*, 111-121.
- Ummah, A. R. (2014, April 17). *Kerugian Akibat Illegal Fishing Capai Rp 100 Triliun Per Tahun*. Retrieved from Investor Website: <https://investor.id/archive/kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-rp-100-triliun-per-tahun>
- UNCLOS. (1982). *Enforcement of Laws and Regulations of the Coastal State*. UNCLOS.
- Wuryasti, F. (2020, Oktober 1). *Kapal Ikan Ilegal Meningkat Selama Pandemi*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/read/detail/349362-kapal-ikan-ilegal-meningkat-selama-pandemi>
- Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing mengacu pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1*.

